



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 150 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR : 1B/KEP/HK/2023 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa masih terdapat usulan rancangan peraturan gubernur dari perangkat daerah yang belum terakomodir dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

**2. Undang-Undang ...**

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1B/KEP/HK/2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal

28 MARET 2023  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 150 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 MEI 2023**TENTANG DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR</b>	<b>ASAL PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perubahan Atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah	
3.	Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
4.	Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
5.	Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
6.	Pembayaran Insentif Dokter Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
7.	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
8.	Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
9.	Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
10.	Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

11.	Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
12.	Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	
14.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
16.	Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
17.	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	
18.	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	
19.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
20.	Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
21.	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
22.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	
23.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
24.	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
25.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
26.	Penyelenggaraan Penanganan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

27.	Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
28.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
29.	Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
30.	Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
31.	Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya	
32.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2027	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
33.	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Tahun 2023	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
34.	Kajian Resiko Bencana (KRB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
35.	Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	
36.	Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana (RKPB)	
37.	Pedoman Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI)	
38.	Wajib Gladi Simulasi Untuk Kantor-Kantor Publik	
39.	Layak Aman Bencana	
40.	Cluster Dalam Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana (RPKB)	
41.	Tata Cara Pengajuan Proposal Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
42.	Penyelenggaraan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT